Pemko Medan Kembalikan 30 Ton Beras dari UEA .....

Dari Halaman 1

prosedur yang jelas.

"Kami telah melakukan pengecekan dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan terkait regulasi ini, dan setelah koordinasi, kami memutuskan untuk tidak menerima bantuan tersebut," kata Rico.

Pemerintah Kota Medan mengaku menerima 30 ton beras dari UEA pada 14 Desember 2025, namun keputusan untuk mengembalikannya diambil setelah mempertimbangkan regulasi yang ada.

"Bantuan itu bisa dimanfaatkan lagi, tapi untuk Kota Medan, kami tidak menerima bantuan asing," tambahnya.

Keputusan Pemko Medan ini tentunya mengundang pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, ada yang mengapresiasi kebijakan untuk menjaga kemandirian dan harga diri bangsa. Namun, banyak juga yang mempertanyakan apakah keputusan ini justru menghalangi solidaritas internasional yang seharusnya membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana.

"Ketika negara dalam kesulitan, mengapa kita menolak bantuan dari negara sahabat? Apakah ini memang kebijakan yang bijak?" ujar salah seorang warga.

Tentu, ini mengundang perdebatan, apakah lebih penting menjaga kemandirian atau membuka pintu untuk solidaritas global dalam menghadapi bencana.**(bes/js)**

1.068 Meninggal, 537.185 Mengungsi .....

Dari Halaman 1

jumpa pers yang disiarkan YouTube BNPB, Kamis (18/12).

Kemudian untuk korban yang masih masuk dalam daftar pencarian atau yang hilang per Kamis (18/12) masih menyisakan 190 orang, dari data sebelumnya 192 jiwa per Rabu (17/12).

"Korban hilang per hari ini masih menyisakan 190 orang," sambungnya.

Rincian korban meninggal per Provinsi, Aceh bertambah menjadi 456 jiwa. Sedangkan untuk korban hilang masih 31 jiwa, dan 4.300 jiwa terluka dari 18 Kabupaten/Kota yang terdampak.

Sementara Sumatra Utara korban meninggal bertambah menjadi 366 jiwa. Korban yang masih masuk dalam daftar pencarian ada 75 jiwa dari 18 Kabupaten/Kota yang terdampak.

Sedangkan Sumatra Barat korban meninggal dunia bertambah menjadi 246 jiwa. Korban yang masih hilang masih 84 jiwa dari 16 Kabupaten/Kota yang terdampak.

"Ada penambahan sembilan jiwa meninggal, tiga di Aceh Utara, dua di Aceh Timur, satu di Tapanuli Selatan, satu di Langkat, satu di Agam dan satu di Padang Pariaman," Kata Muhari.

Di sisi lain jumlah pengungsi yang semula 577.600 orang kini menjadi 537.185 jiwa.

"Untuk jumlah saudara-saudara kita yang masih bergantung di titik-titik dan tempat-tempat pengungsian itu berjumlah 537.185 jiwa," kata Muhari.

Muhari mengatakan per hari ini masih terdapat 27 Kabupaten/Kota yang menetapkan status tanggap darurat. Dengan rincian Aceh 12 daerah, Sumatra Utara delapan daerah, Sumatra Barat tujuh daerah.

"Per hari ini masih ada 27 Kabupaten/ Kota yang menetapkan status tanggap darurat," ujar Muhari.

Muhari mengatakan tim memulai pembangunan Hunian Sementara (huntara) dan Hunian Tetap (huntap) di beberapa Lokasi.**(cnni/js)**

Korban Banjir Sumatra Dapat Santunan Rp10 Ribu .....

Dari Halaman 1

Gus Ipul mengatakan, jadup sebesar Rp 10 ribu per hari untuk korban bencana Sumatera itu akan diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

"Untuk jadup per 10.000 per individu ya. Kalau keluarganya lima ya dapat Rp 10.000 kali 5. Kalau empat ya kali 4, itu selama 3 bulan," ujarnya.

Meski begitu, Gus Ipul mengaku bahwa besaran jadup tersebut belum final dan masih bersifat usulan. Menurutnya, nominal Rp 10 ribu diusulkan berdasarkan pada indeks standar tahun 2020.

"Tadi kami lapor kepada Pak Menko, apakah indeks Rp 10.000 ini masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan. Tentu nanti kami mohon arahan lebih lanjut," ucapnya.

Selain memberi jadup untuk korban bencana Sumatera, Kemensos juga akan memberi santunan kepada korban yang wafat dan luka berat. Korban wafat akan diberi santunan sebesar Rp 15 juta yang diserahkan ke ahli waris, dan korban luka berat diberi santunan senilai Rp 5 juta.

Kemudian, Kemensos juga akan memberi bantuan untuk melengkapi isi dapur senilai Rp 3 juta dan dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi di tahap pertama, sebesar Rp 5 juta.

"Jadi kami ingin sampaikan bahwa Kementerian Sosial menjadi bagian dari tim besar pemerintah, bukan sendirian. Dukungan logistik yang diberikan oleh Kementerian Sosial di masa tanggap darurat misalnya, itu adalah sebagian saja, bisa jadi mungkin sebagian kecil," imbuhnya.**(cnni/js)**

APBN Tekor Rp560,3 T .....

Dari Halaman 1

Rp2.911,8 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Kemudian, keseimbangan primer berada di posisi Rp82,2 triliun atau setara 74,8 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan penerimaan 82,1 persen dari outlook 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per November 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp269,4 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp444,9 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari pagu anggaran Rp3.527,5 triliun yang tersedia pada tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen.

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp795,6 triliun alias 92,1 persen terhadap APBN 2025.**(cnni/js)**

Thailand Bombardir Kota Wisata Judi di Kamboja .....

Dari Halaman 1

belum mengonfirmasi serangan terhadap kota pusat kasino yang ramai dan populer di kalangan penikmat judi tersebut.

Kota Poipet menjadi salah satu situs wisata favorit warga Thailand dan juga salah satu kota penyeberangan antara kedua negara.

Pertempuran terbaru antara dua negara Asia Tenggara itu bulan ini kembali pecah dan telah menewaskan sedikitnya 21 orang dari sisi Thailand dan 17 orang dari sisi Kamboja.

Junta Myanmar Dakwa Ratusan Orang atas Tuduhan Ganggu Pemilu

PM Jepang Takaichi Siap Dialog dengan Beijing usai Bikin China Murka

Pertempuran di perbatasan kedua negara ini juga telah memaksa sekitar 800.000 orang mengungsi.

Konflik ini berakar pada sengketa wilayah terkait penetapan batas perbatasan sepanjang 800 kilometer yang dibuat pada era kolonial, serta sejumlah situs reruntuhan candi kuno yang berada di sepanjang garis perbatasan.

Bangkok dan Phnom Penh saling menyalahkan sebagai pemicu bentrokan terbaru dan saling melontarkan tuduhan serangan terhadap warga sipil.

Thailand pada Selasa mengatakan antara 5.000 hingga 6.000 warga negaranya masih terjebak di Poipet setelah Kamboja menutup jalur penyeberangan darat dengan negara tetangganya itu.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyebut penutupan perbatasan diperlukan demi mengurangi risiko terhadap warga sipil di tengah pertempuran yang berlangsung.

Phnom Penh menuturkan perjalanan udara menjadi opsi utama bagi mereka yang ingin keluar dari daerah konflik.**(cnni/js)**

Semua Wilayah Aceh Tamiang Sudah Tersentuh .....

Dari Halaman 1

Ia juga menyatakan telah mendistribusikan seluruhnya ke 216 desa di sana menyesuaikan dengan kebutuhan warga.

Bupati menyatakan hal ini untuk meluruskan informasi dari jurnalis CNN Indonesia sebelumnya bahwa bantuan sudah banyak yang masuk dan sudah kita distribusikan ke 216 desa sesuai permintaan para kepala desa.

wArmia menyampaikan dalam rangka pemulihan pasca bencana mereka tengah menyiapkan hunian sementara bagi warga terdampak.

Untuk hunian sementara itu, Armia menyebut telah menyiapkan lahan milik pemerintah, dan telah mengirimkan datanya ke Pemprov Aceh untuk ditindaklanjuti.

"Saya berkeinginan di Bulan Januari, huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap) telap bisa kita dirikan, Insya Allah," ucap dia.

Armia mengatakan, ada beberapa desa di Kecamatan Sekerak yang paling parah terdampak bencana yakni Desa Lubuk Sidup, Desa Sekumur, Desa Pematang Durian, dan beberapa desa lain.

"Tetapi alhamdulillah, ini beberapa desa ini bisa kita jangkau dengan darat, memang ada beberapa jembatan yang putus, kita laporkan jembatan yang putus itu ada tiga," katanya.

Tiga jembatan itu adaah Jembatan Baling Karang, Jembatan di Lupuk Sidup, dan Jembatan di Pematang Durian.

Bantuan dari Kementerian Agama juga sudah menyentuh Aceh Tamiang termasuk ke Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak.

Meski butuh waktu karena akses jalan yang rusak, tim Kemenag sudah bisa menjangkau wilayah yang rusak karena banjir.

Total 10 ton bantuan disalurkan ke Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa.**(cnni/js)**

Hukum Dasar Ekologi Kalah Telak Lawan Tandatangan .....

Dari Halaman 1

sung Presiden?

Kita masih ingat betul. Saat masih menjabat sebagai presiden, Joko Widodo pernah menyampaikan secara terbuka bahwa Indonesia punya lahan yang sangat luas. Siapa saja dipersilakan mengelola. Negara siap membuka ruang untuk investasi. Kalimat itu pun disambut dengan tepuk tangan. Tapi alam mencatatnya ini sebagai peringatan.

Kalimat itu kemudian turun ke bawah. Menjadi kebijakan yang melahirkan izin sehingga ribuan hektare kebun sawit terpampang hingga ke kawasan DAS. Bahkan hingga ke lereng dan hulu sungai.

Kini, pernyataan serupa terdengar lagi. Presiden Prabowo berbicara tentang sawit. Tentang sawit yang berdaun yang menampakkan warna hijau. Seakan-akan sawit bisa menggantikan hutan. Seakan-akan daun sawit setara dengan kanopi rimba.

Di sinilah persoalan dimulai. Negara mencampuradukkan pohon dengan hutan. Padahal keduanya berbeda. Sawit adalah tanaman monokultur. Akar dangkal. Tajuk terbuka. Tanah di bawahnya keras dan miskin resapan.

Prof. Mohammad Basyuni, seorang pakar dari Fakultas Kehutanan USU sudah menegaskan itu. Sawit tidak memiliki fungsi ekologis seperti hutan alam. Ia tidak mampu menahan air di kawasan hulu. Sawit tidak mencegah longsor juga tidak menyimpan cadangan air tanah. Sawit hanya berdiri. Diam. Dan membiarkan hujan turun tanpa rem.

Tapi pernyataan para pimpinan dari atas itu terlanjur menjadi legitimasi. Pemerintah daerahpun merasa aman dan Perusahaan-perusahaan itu merasa dilindungi. Izin pun turun. Termasuk untuk di kawasan DAS Bukit Barisan. Juga termasuk di wilayah yang kini tenggelam.

Padahal semua tahu DAS bukan ruang main-main. Tapi tanda tangan tetap juga turun. Dengan alasan investasi, lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi.

Izin sawit di DAS bukan sebuah kecelakaan tetapi produk dari sebuah kebijakan. Produk kompromi. Bahkan produk keberanian melawan ilmu pengetahuan. Ketika banjir datang, izin itu berubah menjadi bukti. Bukan keberhasilan pembangunan.

Islam sudah melarang keras untuk merusak sumber kehidupan. Air adalah amanah. Sungai adalah hak bersama. Ketika negara menyerahkan DAS kepada sawit, negara sedang memindahkan risiko ke rakyat kecil.

Sesungguhnya banjir yang menenggelamkan desa bukan semata bencana alam. Ia hasil keputusan administratif. Ia lahir dari rapat tertutup di ruangan ber-AC berkursi empuk, jauh dari lumpur.

Jika pemerintah masih ingin dipercaya, semua izin sawit di kawasan DAS harus diaudit ulang. Dicabut jika melanggar. Dipulihkan lahannya. Dan pejabat yang menandatangani harus dimintai pertanggungjawaban.

KPPU dan Dewan Pers.....

Dari Halaman 1

Komaruddin Hidayat, yang dinilai merupakan sinyal tegas negara untuk mengintervensi kegagalan pasar yang berpotensi mematikan industri pers nasional.

"KPPU memandang pers yang sehat sebagai pilar demokrasi, dan persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi berkeadilan. Sinergi keduanya merupakan fondasi penting bagi Indonesia yang maju," kata Ketua KPPU, M. Fashurullah Asa (Asa).

Asa menilai, saat ini platform digital bertindak sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang informasi. Posisi dominan ini kerap memicu praktik persaingan usaha tidak sehat, mulai dari algoritma yang tidak transparan hingga kemitraan dalam iklan yang tidak proporsional.

Dalam sambutannya, Asa menyampaikan bahwa dominasi tanpa pengawasan ini berdampak sistemik. Jika media massa mati karena kalah napas melawan monopoli platform, maka publik menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap jurnalisme berkualitas yang terverifikasi.

Asa menegaskan, target KPPU sangat jelas, yakni memastikan tidak ada pelaku usaha bahkan dari skala terbesar, yang boleh menyalahgunakan posisi dominannya untuk mematikan pesaing atau merugikan mitra kerjanya.

Dalam implementasinya, sinergi antara KPPU dan Dewan Pers difokuskan pada tiga pilar aksi yang konkret, yakni penegakan hukum yang tegas, pertukaran data dan informasi, dan advokasi kebijakan.

Ke depannya, melalui kerja sama ini, persaingan usaha yang sehat diharapkan menjadi prasyarat mutlak bagi kebebasan pers yang berkelanjutan. Tanpa persaingan yang adil, independensi media akan tergerus oleh ketergantungan ekonomi kepada satu atau dua platform raksasa.

Langkah KPPU ini menanda awal perjuangan panjang untuk menciptakan iklim usaha yang setara (level playing field). Kolaborasi KPPU dan Dewan Pers diharapkan mampu menjaga jurnalisme Indonesia agar tetap hidup, mandiri, dan bermartabat di tengah gempuran era digital. **(cnni/js)**

Tolong Menolong Dalam Kebaikan

Dari Halaman 1

konsep maqāṣid al-syarī'ah tujuan utama syariat yang salah satu pilar utamanya adalah ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa). Ketika warga terdampak bencana membutuhkan makanan, air, dan perlindungan, maka menjaga keselamatan jiwa harus menjadi prioritas tertinggi. Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa kebijakan harus berpihak pada kemaslahatan terbesar. Jika maslahat menerima bantuan bersifat konkret dan mendesak, sementara mudaratnya hanya administratif atau simbolik, maka prioritas syariat jelas berpihak pada kemanusiaan.

Keputusan Pemerintah Kota Medan mengembalikan 30 ton beras bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban bencana membuka kembali perdebatan klasik dalam komunikasi publik: antara kepatuhan pada regulasi dan kepekaan pada penderitaan warga. Secara administratif, langkah Pemko Medan bisa dipahami.

Namun secara komunikasi publik, kebijakan ini menyisakan persoalan serius.

Pemko Medan berdalih bahwa keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan, yang menegaskan bantuan asing tidak dapat diterima tanpa prosedur yang jelas. Pernyataan Wali Kota Medan menegaskan satu hal: pemerintah daerah memilih berdiri di garis aman birokrasi. Dalam bahasa komunikasi publik, ini adalah compliance communication komunikasi yang berfokus pada kepatuhan struktural, bukan pada dialog sosial.

Masalahnya, bencana bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga soal rasa. Publik yang sedang menghadapi dampak bencana cenderung tidak membaca kebijakan dari kacamata regulasi, melainkan dari sudut pandang empati dan keberpihakan. Ketika pemerintah berbicara tentang "tidak boleh" dan "tidak diizinkan", sementara warga berbicara tentang "lapar" dan "kebutuhan mendesak", maka yang muncul adalah benturan makna.

Dalam konteks komunikasi krisis, empati adalah pesan pertama yang seharusnya disampaikan pemerintah. Sayangnya, empati itu nyaris tak terdengar dalam penjelasan Pemko Medan. Tidak ada narasi yang kuat tentang kondisi korban, tidak ada penegasan bahwa kebutuhan pangan warga tetap terjamin, dan tidak ada penjelasan alternatif yang meyakinkan. Akibatnya, publik menangkap pesan yang dingin dan kaku: regulasi lebih penting daripada manusia.

Pemko Medan juga tampak membangun framing kemandirian dan harga diri bangsa. "Untuk Kota Medan, kami tidak menerima bantuan asing," demikian pernyataan yang beredar. Dalam situasi normal, narasi ini mungkin terdengar heroik. Namun dalam situasi bencana, framing tersebut justru berjarak dengan realitas korban. Solidaritas internasional dalam bencana bukan simbol ketergantungan, melainkan ekspresi kemanusiaan universal. Banyak negara tetap menjaga kedaulatan, sembari membuka pintu bantuan atas nama kemanusiaan.

Dari perspektif komunikasi risiko, kebijakan ini juga menyisakan kekosongan informasi. Publik tidak diberi gambaran jelas: apa risiko konkret jika bantuan diterima? Apakah ada ancaman hukum yang nyata? Dan yang terpenting, bagaimana negara menjamin bahwa bantuan pengganti akan tiba dengan cepat dan memadai? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tak dijawab, ruang publik dipenuhi spekulasi, kecurigaan, dan kekecewaan.

Perlu ditegaskan, kritik ini bukan semata soal menerima atau menolak bantuan asing. Inti persoalannya adalah cara kebijakan dikomunikasikan.

Pemerintah boleh saja menolak bantuan demi kepatuhan regulasi, tetapi komunikasi publik menuntut lebih dari sekadar kepatuhan. Ia menuntut kejelasan, empati, dan kemampuan membangun makna bersama.

Dalam negara demokratis, kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari keputusan yang sah, tetapi dari cara keputusan itu dijelaskan. Ketika bahasa birokrasi terlalu dominan, sementara bahasa kemanusiaan absen, maka kebijakan yang legal bisa berubah menjadi beban moral di mata publik.

Bencana seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk menunjukkan wajah paling manusiawinya. Regulasi memang penting, tetapi empati adalah fondasi kepercayaan. Jika pemerintah gagal menghadirkan empati dalam komunikasi publiknya, maka yang dikembalikan bukan hanya bantuan, melainkan juga harapan warga bahwa negara benar-benar hadir di saat paling sulit.